

**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI
KABUPATEN KUBURAYA**

Oleh:

Falentinus

NIM :E1011141106

Isdairi, Martinus

*Email:e1011141106@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih tingginya angka kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan indikator kinerja dari Dwiyanto yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dari kelima indikator tersebut penulis hanya menggunakan tiga indikator saja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan, kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kubu Raya sudah bisa dikatakan baik namun perlu adanya peningkatan. Dilihat dari produktivitas sudah bisa dikatakan baik, hanya saja belum optimal karena sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Dilihat dari Kualitas Layanan bisa dikatakan baik juga hanya kurang efektif karena masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun korban kekerasan. Dilihat dari Akuntabilitas bisa dikatakan sudah baik dilihat dari bagaimana pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya selalu taat pada aturan dan bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan.

Kata Kunci: Kinerja, DP3KB, Kekerasan pada anak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Anak bukan hanya semata-mata tanggung jawab orang tua, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga melindungi anak dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, selain peraturan ini dibuat juga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang mempunyai salah satu tujuan dalam bidang perlindungan anak yaitu pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan dibuatnya peraturan diatas, pemerintah Kabupaten Kubu Raya membentuk lembaga atau badan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yakni suatu

badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tujuannya adalah salah satunya bentuk wahana pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat, serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan orang/trafficking dan pelecehan seksual. Jadi dengan di bentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB), pemerintah dan masyarakat berharap berkurangnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan pada anak di Kabupaten Kubu Raya, jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebagai pelaksana kebijakan tersebut kinerjanya belum optimal dalam mencapai tujuan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Di Kabupaten Kubu Raya sendiri, kekerasan terhadap anak meningkat cukup tinggi. Berdasarkan berita dari kalbaronline.com kepala Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak (KPPAD) Kabupaten Kubu Raya mengatakan pada tahun 2017 kasus kekerasan pada anak sebanyak 17 kasus dan pada 2018 meningkat sebanyak 23 kasus kekerasan pada anak. Tidak hanya sampai disitu, fenomena kasus kekerasan pada anak ada terus terjadi pada tahun-tahun

berikutnya seperti yang diberitakan di pontianak.tribunnews.com pada Selasa 7 Januari 2020 yaitu kematian seorang anak yang berusia 9 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak (KPPAD) Kabupaten Kubu Raya juga mencatat angka kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, seksual maupun verbal serta kasus penelantaran yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018 hingga 2019 meningkat yaitu sepanjang tahun 2018 terjadi 23 kasus kekerasan pada anak dan sepanjang tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dengan jumlah 31 kasus. Kemudian pada Agustus 2020 dari berita pontianak.tribunnews.com telah terjadi peningkatan kasus terhadap anak sebanyak 39 kasus yang terjadi dari Januari hingga Agustus, dan total kasus yang terjadi pada anak sepanjang 2020 yaitu sebanyak 70 kasus. Diah Savitri mengatakan bahwa kasus tersebut lebih parah dari tahun sebelumnya, ia juga menyebutkan dari beberapa kasus tersebut yang paling

menonjol adalah kasus kekerasan seksual kepada anak yang di mana dari banyaknya kasus yang terjadi rata-rata dilakukan orang-orang terdekat anak itu sendiri seperti orang tua, kerabat, bahkan tetangga.

Masalah lainnya dalam penanganan kasus kekerasan pada anak ada masalah lainnya seperti Rumah aman atau shelter ini sangat diperlukan karena untuk memberikan rehabilitasi psikologi untuk anak korban kekerasan maupun anak pelaku kekerasan karena diperlukan suasana yang tenang dan kondusif untuk bisa berkomunikasi dengan anak korban kekerasan dan memulihkan kembali psikologinya seperti sediakala. Selain itu juga untuk diberikannya kegiatan-kegiatan positif seperti pelatihan-pelatihan keterampilan untuk memulihkan keadaan korban tersebut.

Selain itu Selain itu sumber daya manusia pendukung dalam pencegahan dan menangani kasus kekerasan yang terjadi masih dirasakan kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya pegawai yang bekerja pada

bidang perlindungan anak dan kesejahteraan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Masih tingginya angka kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya.
2. Tidak adanya fasilitas seperti rumah aman atau shalter tempat rehabilitas korban yang mengalami tindak kekerasan.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas sehingga terkesan lambat dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah penulis jelaskan, maka masalah dalam penelitian ini perlu difokuskan agar sasaran penelitian dapat diungkapkan secara jelas. Penelitian ini di fokuskan pada “Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Kubu Raya yang berkaitan dengan Produktivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kubu Raya”.

5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu : untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kubu Raya.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak, seperti: Institusi Pendidikan dan Instansi Terkait.

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dari bahan pemahaman maupun pembelajaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian secara mendalam mengenai Kinerja Organisasi khususnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kubu Raya.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sebagaimana penulis meneliti tentang Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kubu Raya.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Pasolong (2013, 177) adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. Teori kinerja dari Dwiyanto (2017, 50-51) dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia terdapat indikator kinerja, yaitu:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara

input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan

terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjukkan pada keselarasan antar program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu

indikator kinerja karena responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan

organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik itu tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari

ukuran eksternal, seperti nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

2. Alur Pikir Penelitian

Judul

KinerjaDinas Pembedayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Kabupaten Kubu Raya



Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya angka kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupten Kubu Raya.
2. Tidak adanya fasilitas seperti rumah aman atau shalter tempat rehabilitas korban yang mengalami kekerasan.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas sehingga terkesan lambat dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak.



Teori

Dwiyanto (2017, 50-51) mengemukakan indikator dari kinerja sebagai berikut:

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas



Output

Untuk Mendeskripsikan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kubu Raya

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian deskriptif adalah cara menggambarkan atau melukiskan gejala berdasarkan data dan fakta secara aktual.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.

- b. Kepala bidang perlindungan anak.
- c. Pihak kepolisian yang bersangkutan.
- d. Masyarakat.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Moleong (2000, 190) yaitu dengan menggunakan analisis interaktif, yaitu:

1. Meringkas, pada tahap ini data yang sudah terkumpul dirangkum, dipilih dan di fokuskan dengan hal yang penting.
2. Memaparkan, pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk singkat, bagan dan hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Menyimpulkan, pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul

dan sudah diringkas sehingga akan mempermudah untuk dibaca dan dipahami.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, aspek-aspek sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio input dengan output, konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting, oleh karena itu, perlu melihat sumber daya manusia (SDM) serta anggaran untuk pembiayaan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga atau pun kekerasan lainnya yang melibatkan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya sebagai input atau masukan dalam proses mengatasi permasalahan kekerasan pada anak.

Hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya sebagai wahana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa mereka, akan tetapi ada beberapa pelayanan yang belum maksimal mereka berikan hal tersebut dikarenakan di beberapa bidang pelayanan khususnya bidang perlindungan anak masih terdapat kekurangan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan adanya penanganan korban yang di rasakan terlambat dalam penyelesaiannya. Dapat disimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai produktivitas masih kurang maksimal.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan tentu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi pemerintahan karena kualitas layanan akan berhasil

dilaksanakan apabila pelayanan yang diberikan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani sebagai contoh seseorang atau masyarakat merasa puas atau tidak. Kualitas layanan dikatakan baik apabila masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan, masyarakat merasa senang dalam menyelesaikan keperluan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cukup bagus akan tetapi belum optimal hal tersebut karena adanya masyarakat yang sudah lama melapor tetapi harus menunggu dipanggil lagi untuk melanjutkan penyelesaian kasusnya memakan waktu sampai berhari-hari. Tidak hanya itu sarana dan prasarana yang dimiliki juga belum begitu lengkap dalam memberikan pelayanan seperti ruang khusus pelapor yang tidak terdapat banyak orang agar kerahasiaan

korban yang di laporkan dapat terjaga dan juga rumah aman tempat rehabilitasi korban belum ada dan masih dalam pembangunan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat luas. Dalam menjalankan suatu kebijakan agar mendapatkan hasil yang maksimal, salah satu yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah dari akuntabilitas yaitu keterbukaan dan bentuk pertanggungjawaban atau dengan kata lain bagaimana standar atau sasaran yang harus di capai oleh pelaksana kebijakan.

Dalam akuntabilitas ini peneliti melihat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan penanganan korban kekerasan dengan instansi terkait yang

bertanggungjawab pula dalam memberikan pelayanan baik itu bantuan hukum, psikolog maupun medis hingga kasus-kasus tersebut selesai.

Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah baik hal tersebut ditunjukkan dengan pihak dinas yang selalu mengontrol setiap penyelesaian kasus yang ada sampai kasus tersebut benar-benar terselesaikan. Tidak hanya itu sebagai bentuk tanggung jawab juga pihak dinas selalu memberikan sanksi kepada pegawainya jika melakukan sebuah kelalaian dalam melakukan tugasnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan akhir tentang Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kubu Raya dalam menangani permasalahan kekerasan pada anak belum optimal. Adapun kesimpulan yang yang didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak masih kurang efektif, dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang.
2. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya masih kurang optimal karena sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai seperti belum adanya ruang yang dikhususkan untuk pelapor, kendaraan operasional yang masih kurang, dan belum adanya shelter atau rumah aman, serta alur

pelayanan yang dianggap terlalu panjang.

3. Akuntabilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya sudah optimal karena dari pihak dinas yang selalu mengontrol kasus-kasus yang ada sampai selesai dan tidak adanya pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugas mereka.

2. Saran

Adapun saran/rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan produktivitas agar kinerja menjadi lebih optimal seharus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya menambahkan sumber daya manusia pada bidang perlindungan dan kesejahteraan anak agar kinerja menjadi optimal.

2. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya menambahkan fasilitas seperti shalter, ruang khusus pelapor, dan kendaraan operasional khusus korban agar pelayanan yang diberikan kepada korban lebih optimal lagi.

penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dharma, Surya. 2013. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: PSKK UGM

Dwiyanto, Agus dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Atik, dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual,*

Eko, Widodo Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Huda, Miftahul. 2012. *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kotler, Philip. 2012. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawati, Penny. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mangkunegara, Prabu Anwar AA. 2010. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pujawan. 2010. *Supply Chain Management*. Surabaya: Guna Widya.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Raja Grafindo persada.
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budayadan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan*

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).
Bandung: Alfabeta.

*Karanganyar dalam Penanganan
dan Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Karanganyar*. Skripsi.
FISIP: Universitas Negeri
Surakarta

2. Dokumen

Undang-Undang Nomer 35 Tahun
2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomer 1 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomer
45 Tahun 2016

3. Rujukan Elektronik

<https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/09/kppad-kubu-raya-sebut-sepanjang-2019-kasus-kekerasan-anak-meningkat>

<https://pontianak.tribunnews.com/2020/09/25/kpaid-kubu-raya-ungkap-jumlah-kasus-kekerasan-anak-diah-paling-menonjol-kekerasan-seksual>

<https://www.kalbaronline.com/2019/08/02/pulihkan-korban-kekerasan-terhadap-anak-pemkab-kkr-bakal-sediakan-shelter/>

4. Referensi Jurnal Skripsi

Ardan, Andi Muhammad. 2016.
*Kinerja Pegawai Satuan Polisi
Pamong Praja Dalam
Menertibkan Pedagang Kaki Lima
Di Kecamatan Samarinda Ilir
Kota Samarinda*. Skripsi. FISIP:
Universitas Mulawarman
Samarinda.

Putro, Antonius Awang Prasetyo.
2011. *Kinerja Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten*